

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Kondisi perekonomian di Indonesia semakin berkembang dan menjadikan industri keuangan salah satu industri yang berkembang secara pesat dan memiliki kompleksitas operasional serta tingkat kompetisi yang tinggi. Kompleksitas operasional dan tingkat kompetisi tersebut menyebabkan industri keuangan terekspos pada risiko yang tinggi.

Bank sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di industri keuangan, terus mengalami perkembangan dan memiliki kompleksitas operasional dan risiko yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank dibedakan menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaan utama antara Bank Umum dan BPR yaitu dalam hal kegiatan operasionalnya, BPR tidak dapat menciptakan uang giral dan memiliki jangkauan dan kegiatan

operasional yang terbatas, sedangkan Bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah.

Bank berfungsi sebagai alat intermediasi antara orang yang memiliki dana berlebih dan orang yang membutuhkan dana, dengan alur yaitu bank menerima simpanan dari masyarakat kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman berupa kredit atau pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut berarti sumber dana atau modal bank sebagian besar dari dana masyarakat. Sehingga untuk menjaga dan memastikan pengelolaan dana masyarakat dikelola dengan baik dan benar, maka diperlukannya pengawasan yang efektif terhadap perbankan.

Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka BPR perlu segera menerapkan tata kelola.

Unsur tata kelola (*corporate governance*) terdapat dalam laporan keuangan yang merupakan sebuah rangkaian tentang sebuah proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarah, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Penerapan tata kelola yang baik berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan, perusahaan atau manajemen akan sulit untuk melakukan manipulasi akuntansi karena terdapat pengawasan dari

Dewan Komisaris sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan berintegritas (Nuryanah, 2005).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berdasarkan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*), yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima dasar tersebut, Bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan bank menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia sejak tanggal 31 Desember 2014, merupakan suatu bagian dari usaha pemerintah untuk meningkatkan pengawasan industri jasa keuangan yang tertuang dalam tujuan OJK, yaitu “Agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang

tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat”. Kantor Regional (KR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sarana penghubung dan koordinasi antara Kantor Pusat OJK dan Kantor OJK di wilayahnya. KR 2 Jawa Barat merupakan salah satu Kantor Regional yang mengawasi 105 BPR dan 7 Bank Umum di Jawa Barat. Perkembangan industri perbankan di wilayah KR2 secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya, dilihat dari total asset Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah posisi 2015 meningkat 9.66% atau 72,268 Trilyun dari posisi tahun 2014.

Permasalahan tata kelola BPR yang terjadi di wilayah KR 2 berdasarkan hasil pengawasan antara lain pemenuhan jumlah pengurus BPR yang tidak sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.20/POJK.02/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang belum optimal tercermin dari frekuensi penyelenggaraan rapat yang belum sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, campur tangan Pemegang Saham (PS) dalam kegiatan operasional BPR, penetapan gaji pengurus yang tidak transparan, rendahnya komitmen manajemen dalam mengembangkan sumber daya manusia BPR tercermin dari belum menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan, dan struktur organisasi yang tidak memenuhi fungsi pengendalian intern tercermin dari jabatan kosong ataupun rangkap jabatan. Sementara dilihat dari rasio-rasio keuangan BPR di Jawa Barat yaitu rata-rata rasio NPL masih di atas 5%, rasio LDR yang masih di bawah 80% dan rasio ROA yang rendah di bawah 5%.

Sejak tanggal 31 Maret 2015, OJK telah memberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penerapan tata kelola penting dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota maupun Direksi dan anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu dan bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPR secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola secara optimal. BPR besar yang memiliki volume usaha yang besar serta struktur organisasi yang cukup kompleks seharusnya menerapkan Tata Kelola secara penuh termasuk pemenuhan dan kelengkapan struktur organisasi. Adapun bagi BPR kecil penerapan Tata Kelola lebih mengedepankan terlaksananya fungsi Tata Kelola dengan baik.

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Amin Widjaya tunggal (2011:156):

“*Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder*, karyawan, dan masyarakat sekitar”

Dari definisi teori yang diberikan diatas dapat dijelaskan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan intern dan ekstern perusahaan baik hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan kepentingan *stakeholder*. *Good Corporate Governance* berusaha

menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam *Good Corporate Governance* adalah mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan semaksimal mungkin, sehingga tidak mebebankan biaya yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas. Penilaian terhadap pemenuhan kesejahteraan tersebut adalah profitabilitas yang dapat dicapai oleh BPR.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap *return on assets* BPR di Jawa Barat sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya (Arif Saripudin, 2014) dimana pada penelitian sebelumnya terdapat pengaruh antara *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas perusahaan. Namun berbeda dengan sebelumnya dimana objek perusahaan yang diteliti adalah semua perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, berbeda dengan penelitian ini yaitu BPR Konvensional di Jawa Barat, faktor independennya yaitu mengenai Laporan Keuangan dan peraturan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4 /POJK.03/2015 perihal GCG. Dalam penelitian ini, variabel GCG diuji untuk mengetahui apakah berpengaruh terhadap pencapaian *return on assets* BPR. Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan diteliti lebih lanjut tentang:

**“PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (MODAL INTI, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI) SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.03/2015 TERHADAP *RETURN ON ASSETS* (Studi Kasus pada Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Barat)”.**

### **1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Seberapa besar modal inti pada BPR di Jawa Barat?
2. Bagaimana pemenuhan Dewan Komisaris pada BPR di Jawa Barat?
3. Bagaimana pemenuhan Direksi pada BPR di Jawa Barat?
4. Seberapa besar *Return On Assets* BPR di Jawa Barat?
5. Berapa besar pengaruh Modal Inti, Dewan Komisaris dan Direksi secara parsial dan simultan terhadap Return on Assets BPR di Jawa Barat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar modal inti BPR di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pemenuhan jumlah Dewan Komisaris BPR di Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pemenuhan jumlah Direksi BPR di Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui seberapa besar *Return On Assets* BPR di Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Modal Inti, Dewan Komisaris dan Direksi secara parsial dan simultan terhadap *Return on Assets* BPR di Jawa Barat?

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan ilmu ekonomi khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4 /POJK.03/2015 Tentang mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Return On Assets* pada BPR

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain :

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang aplikasi ilmu teori pada perkuliahan dengan penerapan materi yang sebenarnya. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

#### b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan terutama mengenai mekanisme *Good Corporate Governance* dengan menggunakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 /POJK.03/2015.



c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan bagi investor dan para pelaku pasar modal dalam melakukan seleksi perusahaan dan pengambilan keputusan investasi.

d. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam melakukan penelitian sebelumnya.